

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

1.1 Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah penerimaan Pajak hotel, restoran, dan pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Adapun subjek penelitiannya di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 31 dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Letnan Harun No. 1 Kota Tasikmalaya 46134.

1.1.1 Sejarah Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Tasikmalaya, karena kota ini sebelumnya merupakan ibukota dari kabupaten tersebut. Kemudian pada tahun 1976 meningkat statusnya menjadi kota administratif, pada saat A. Bunyamin menjabat sebagai Bupati pada tahun 1976-1981. Melalui peraturan pemerintahan Nomor 22 Tahun 1976 pada saat itu, diresmikanlah Kota Administratif Tasikmalaya oleh Menteri Dalam Negeri yang pada waktu itu dijabat oleh H. Amir Machmud. Walikota Administratif pertama adalah Drs. H. Oman Roosman, yang dilantik oleh gubernur Jawa Barat, H. Aang Kunaefi.

Wilayah Kota Administratif Tasikmalaya pada awalnya hanya meliputi 3 kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung, dan Tawang dengan jumlah desa

hanya sebanyak 13 desa saja. Kemudian di tahun 2001, dirintislah pembentukan Pemerintahan Kota Tasikmalaya oleh Bupati Tasikmalaya, Kol. Inf. H. Suljana Wirata Hadisbrata (1996 - 2001), dengan membnetuk tim sukses Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diketahui oleh H. Yeng Ds. Partawinata SH. Melalui proses yang pajang akhirnya dibawah pimpinan Kota Tasikmalaya sebagai pemerintahan daerah otonom diteteapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta bersama-sama dengan Kota Lhoksemawe, Langsa, Padangsidempuan, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pagar Aalam, Tanjung Pinang, Cimahi, Batu, Sikawang, dan Bau-bau. Selanjutnya pada 18 oktober 2001 pelantikan Drs. H. Wahyu Suradiharja sebagai pejabat Walikota Tasikmlaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung.

Melalui surat keputusan no. 133 Tahun 2001, 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD), selanjutnya pengangkatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya di sahkan memaui Keputusan Gubernur Jawa Barat, No. 171/Kep.380/Deko/2002, tanggal 26 April 2001, dan pada tanggal 30 April 2002 keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya pertama diresmikan. Kemudian di tanggal 14 November 2002, Drs. H. Bubun Bunyamin dilantik sebagai Walikota Tasikmalaya, sebagai hasil tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh legislatif.

Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 15

dan Desa sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No. 30 Tahun 2003 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa-desa yang berada di lingkungan wilayah Pemerintahan Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan, oleh karena itu, maka jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, dengan ke 10 kecamatan tersebut antara lain:

- Kecamatan Tawang
- Kecamatan Cihideung
- Kecamatan Cipede
- Kecamatan Indihiang
- Kecamatan Kawalu
- Kecamatan Cibeureum
- Kecamatan Mangjubumi
- Kecamatan Tawangsari
- Kecamatan Purbaratu
- Kecamatan Bungursari

1.1.2 Visi dan Misi Pemerintahan Kota Tasikmalaya

Visi dapat diartikan secara rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan

dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi dan misi Kota Tasikmalaya tentang Rencana Pembangunan Jangka Megengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, adalah sebagai berikut :

1) Visi

“Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Madani”.

2) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan ini disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan ini dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya yang akan dicapai visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal.
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4. Memenuhi pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia.

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

1.1.3 Sejarah Singkat berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

Sejalan dengan terbentuknya Kota Administratif Tasikmalaya pada tanggal 3 November 1976 yang meliputi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Cihideung, Kecamatan Cipedes, dan Kecamatan Tawang, dalam melaksanakan pemungutan pendapatan wilayah Kota Administratif dibentuk cabang Dinas Perpajakan dan Pendapatan Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor. SK.B.I/Peg/I/163-Sek/Str-Org/Paj/72 Tentang Pembentukan Dinas Perpajakan dan Pendapatan Kabupaten Tasimlaya dengan disahkan oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 2 Maret 1973, No. 78/A-V/18/Perund/SK/1973.

Dengan kewenangan pemungutannya antara lain Pajak Daerah yang meliputi komponen Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Bawah Tanah. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada era otonomi daerah, yang secara efektif dimulai pada tanggal 1 Januari Tahun 2001, dilakukan dengan cara memberikan kewewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang pembentukan Kota Tasikmalaya tanggal 7 oktober 2001 maka Pemerintah

Daerah membentuk Kantor Pendapatan Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Keputusan Pj. Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2001.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya, diubah pada tanggal 21 Oktober 2003.

Pada tanggal 27 Februari 2004, di Dinas Pendapatan dilantik kepala Dinas (Eselon II) beserta para Kabag TU/Kabid (Eselon III) dan para (Kasi/Kasubag) dengan struktur organisasi dan jumlah karyawan dengan berdasarkan surat keputusan Walikota Tasikmalaya No. 24 Tahun 2004, Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya, serta Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Organisasi Kota Tasikmalaya.

1.1.4 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

1. Visi

Terwujudnya Peningkatan Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Sebagai Andalan Penerimaan Daerah.

2. Misi

- 1) Mengembangkan sistem informasi pendapatan daerah;
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparat dengan upaya pelaksanaan pelayanan yang prima;
- 3) Merumuskan dan menyusun aspek legalitas mengenai pendapatan daerah serta penegakan hukum/penerapan sanksi;

- 4) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

1.1.5 Tugas Pokok, fungsi dan Wewenang Dispenda Kota Tasikmalaya

Tugas pokok dan fungsi Dispenda Kota Tasikmalaya berdasarkan peraturan daerah Kota Tasikmalaya Nomor 06 Tahun 2013, Tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya serta Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2004, tentang Rincian Tugas pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya adalah :

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dispenda Kota Tasikmalaya melaksanakan sebagian urusan administrasi keuangan daerah.

2. Fungsi Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- 2) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang pendapatan daerah;
- 3) Pengendalian dan pengawasan pendapatan daerah;
- 4) Pengoordinasian tata kerja dan tata hubungan kerja di bidang pendapatan daerah;
- 5) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;

- 6) Pelaksanaan penggalan potensi pendapatan daerah dan penyuluhan dan sosialisasi pajak ;
 - 7) Pelaksanaan kerjasama dalam rangka penggalan potensi pendapatan daerah;
 - 8) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan;
 - 9) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan di bidang pendapatan;
 - 10) Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dibidang keuangan adalah :
1. Pelaksanaan pengkoordinasian teknis operasional dibidang Pendapatan Daerah;
 2. Perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pendapatan Daerah;
 3. Penetapan pajak dan retribusi;
 4. Pelaksanaan pendanaan dan pendaftaran pajak dan retribusi;
 5. Penelitian pengembangan potensi pajak daerah; dan
 6. Perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan daerah.

1.1.6 Susunan Orgaanisasi dan Tata Kerja Dispenda Kota Tasikmalaya

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris:
 - .Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - . Sub Bagian Keuangan;
 - . Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang PBB dan BPHTB :
 - . Seksi Pendaftaran dan Penetapan PBB dan BPHTB;
 - . Seksi Pembukuan dan penagihan PBB dan BPHTB;
 - . Seksi Pengendalian dan Pembinaan Pengelola PBB dan BPHTB;
4. Bidang Pajak Daerah Lainnya :
 - . Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah lainnya;
 - . Seksi Pembukuan dan Penghasilan Pajak Daerah lainnya;
 - .Seksi Pengendalian dan Pembinaan Pengelola Pajak Daerah lainnya;
5. UPTD Dinas
6. Kelompok Jabatan Fungsional

1.1.7 Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

- a. Hal – hal yang menjadi tugas pokok Dinas Pendapatan merupakan satu kesatuan, yang satu sama lain tidak dipisahkan.
- b. Pelaksanaan fungsi dinas sebagai pelaksanaan Pemerintah Daerah, kegiatan teknis operasional diselenggarakan pada Kepala Bidang dan kelompok Jabatan Fungsional serta kegiatan

ketatausahaan diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha menurut bidang tugas masing-masing.

- c. Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam menjalankan tugas pokoknya menjalankan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- d. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integritasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- e. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya.

1.1.8 Sejarah Singkat, Struktur Organisasi, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan jenis, tipologi dan tugas atau Urusan Pemerintah Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan perangkat daerah dengan tipe A yang melaksanakan tugas pengelola keuangan dan aset daerah.

visi misi

Selaras dengan visi Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022 yaitu
 “KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI ”.

Adapun misi dalam upaya yang akan dicapai visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal.
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
2. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
3. Memenuhi pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya ini, bertanggung jawab untuk mendukung ke 5 misi yaitu meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintah yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelola keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik yang didukung sarana bangunan kantor

dan prasarana pemerintah yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegritas.

Selanjutnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarjan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya, dalam mewujudkan pencapaian misi ke 5 tersebut mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategis dan arah kebijakan RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya adalah :

1. Sasaran ke lima belas meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi, dan strategi meningkatkan pelayanan publik yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi informasi yang dilakukan melalui program tasik layanan prima, serta arah kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
2. Sasaran ke enam belas meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah, dan strategi meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegritas mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaa, pengawasan, dan pelaporan

melalui pelaksanaan program peningkatan kinerja keuangan dan aparatur yang berorientasi pada hasil dan kinerja serta arah kebijakan peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan asset daerah yang proposional dan akuntabel, peningkatan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntabel, serta memacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah.

Dengan mengacu pada tujuan sasaran, srategis dan arah kebijakan dalam RPJMD tersebut diatas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarjan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarjan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut:

Tujuan :

1. Meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah.
3. Meningkatkan tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah

Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah akuntabel
3. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah.

Tugas dan fungsi:

Tugas utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah membantu Walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkungan tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaran fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan pengelola administrasi badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

3.1.9 Susunan Organisasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya terdiri dari :

1. Kepala Badan:
2. Sekretaris:
 - . Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - . Sub Bagian Keuangan;
 - . Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bidang Anggaran:
 - . Sub Bagian Anggaran Pendapatan;
 - . Sub Bagian Anggaran Belanja;
4. Bidang Pembendaharaan:
 - . Sub Bidang Kas Daerah;
 - . Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
 - . Sub Bidang Penata Usahaan Keuangan Daerah;
5. Bidang Akuntansi:
 - . Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
 - . Sub Bidang Akuntansi Belanja;
 - . Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
6. Bidang Aset Daerah
 - . Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
 - . Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
 - . Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;

7. UPT Badan
8. Kelompok Badan Fungsional.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus.

3.2.1 Operasionaliasi Variabel

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis pada pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen.

Sehubungan dengan judul yang diajukan penulis yaitu “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.” Maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Independen (Variabel X)

Menurut Sugiyono (2013:4) “Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat”. dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya yaitu Pajak Hotel (X_1) dan Pajak Restoran (X_2).

2. Variabel Dependen (Variabel Y)

Variabel Dependen atau variabel yang terikat adalah Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena ada variabel bebas (Sugiyono, 2013:4). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y)

Untuk lebih jelasnya penulis sajikan operasionalisasi variable yang diteliti data Tabel 3.1 berikut ini :

Table 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Ukuran	Skala
Pajak Hotel (X ₁)	Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel (Perda Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011)	Jumlah penerimaan pajak Hotel.	Rupiah	Rasio
Pajak Restoran (X ₂)	Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (Perda Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 10)	Jumlah penerimaan pajak restoran.	Rupiah	Rasio
Pendapatan Asli daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan (UU Nomor 33 Tahun 2004).	Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari: • Pajak daerah • Retribusi daerah • Hasil pengelolaan kekayaan	Rupiah	Rasio

		yang dipisahkan • Lain-lain PAD yang sah		
--	--	--	--	--

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.3 Jenis Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh pebeliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Nurindiantoro,2009;146). Menurut Danang Sunyoto (2013:21), berdasarkan sifatnya data primer dikatagorikan menjadi dua macam, yaitu kualitatif yang berupa variasi persepsi-persepsi dan data kuantitatif yang berupa angka atau bilangan.

Untuk membperoleh hasil penelitian yag diharapkan maka, dibutuhkan data dan informasi yang mendukung penelitian ini. Dalam memperoleh data dan informasi tersebut, penulis mengumpulkan data berupa:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang diperoleh dari objek penelitian secara langsung guna memperoleh data primer yang diperlukan dalam kaitannya dengan

penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data primer adalah sebagai berikut:

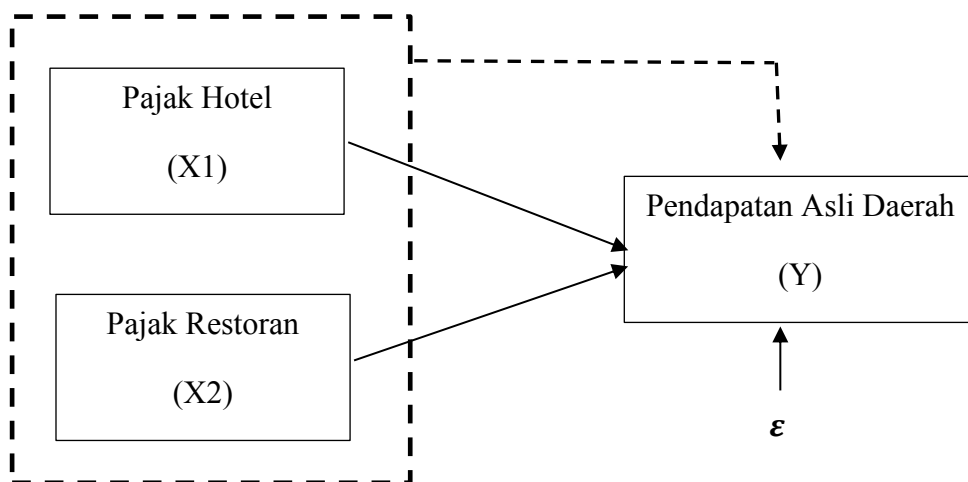
- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan keyakinan bahwa data yang diperbolehkan sebelumnya benar.
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab antara penulis dengan pihak pemberi informasi.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat catatan-catatan, dokumen-dokumen, dan mengamati formulir serta laporan yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur atau sumber-sumber bacaan lainnya yang mempunyai kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini digunakan sebagai pembanding yang akan mendukung dalam pembahasan hasil penelitian, sehingga penulis dapat menarik hasil kesimpulan yang logis dari hasil penelitian, pada dinas bersangkutan.

3.3 Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel independen (variabel bebas) dan terdapat satu variabel dependen (variabel terikat). Variabel independen dalam penelitian ini diantaranya adalah Pajak Hotel (X_1) dan Pajak Restoran (X_2) sedangkan Pendapatan Asli Daerah (Y).



Gambar 3.1 Paradigma Penelitian

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Pengujian Asumsi klasik

Penelitian ini menggunakan analisis pengujian regresi linier berganda sehingga perlu dilaksanakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik regresi merupakan uji prasyarat jika menggunakan analisis regresi linier (Duwi Priyatno, 2013:49). Uji asumsi klasik terdiri dari:

3.4.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah data residual terdistribusi dengan normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data residual yang terdistribusi secara normal (Dwi Priyatno, 2013;50). Terdapat dua cara yang sering digunakan residual yaitu dengan analisis grafik (normal P-P plot) regresi dan uji *one sample Kolmogorov-smirnov*. Dalam penelitian ini juga statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *one sample Kolmogorov-smirnov* (1- sample K-S) dan analisis grafik normal (normal P-P plot). Jika hasil *one sample Kolmogorov-smirnov* menunjukkan hasil signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal sedangkan jika hasil *one sample Kolmogorov-smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal.

Sedangkan analisis grafik (normal P-P plot) merupakan cara sederhana yang dapat mendukung analisis statistik. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Bentuk data yang terdistribusi secara normal akan mengikuti pola distribusi normal dimana grafiknya mengikuti garis diagonal. Jika data telah terdistribusi secara normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

3.4.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2) dengan cara meregresikan setiap variabel independen dengan variabel independen lainnya dengan tujuan untuk mengetahui nilai koefisien r^2 dimana nilai koefisien r^2 tersebut akan membandingkan nilai R^2 . Dengan kriteria pengujian :

- ✓ Jika $r^2 > R^2$ maka terjadi multikolinieritas
- ✓ Jika $r^2 < R^2$ maka tidak terjadi multikolinieritas

3.4.1.3 Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi pada model regresi dapat dilakukan dengan menggunakan metode run-rest. metode *run-test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Jika *asympt Sig. (2-tailed)* pada output *run test* lebih besar dari 0,05 maka data tidak mengalami atau mengandung autokorelasi atau sebaliknya (Ghozali,2011), atau dengan kriteria :

- Jika *asympt Sig* pada output run test lebih dari 0,05 maka data tidak mengalami autokorelasi.
- Jika *asympt Sig* pada output run test kecil dari 0,05 maka data mengalami autokorelasi.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t

dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ atau periode t sebelumnya (Danang Sunyoto, 2013). Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari promlem autokorelasi.

3.4.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu diuji mengenai sama atau tidaknya varian residul dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi homosdastisitas dan jika variannya tidak sama atau berbeda disebut heteroskedastisitas. Pesamaan regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas (Danang Sunyono, 2013).

Analisis uji asumsi heterosdestisias hasil output SPSS melalui grafik *scatterplot* antara nilai Z *prediction* (ZRED) yang mempunyai variabel bebas (sumbu $x=y$ hasil prediksi – Y riil). Homosdastisitas terjadi jika *scatterplot* titik-titik hasil pengolahan data antara ZRED dan SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik oorigin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur baik menyempit, melebar maupun bergelombang.

3.4.2 Metode Regresi Linear Berganda

Penelitian ini terdiri dari 2 variabel independen (pajak hotel dan pajak restoran) dan satu variabel dependen (pendapatan asli daerah)

sehingga menggunakan regresi linear berganda. Persamaan regresi yang digunakan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \quad (\text{Sugiyono, 2013; 275})$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah (Variabel dependen)

a = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien regresi

X_1 = Pajak Hotel

X_2 = Pajak Restoran

E = Error

3.4.3 Pengujian Hipotesis

Ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of Fit-nya*. Secara statistik, hal tersebut dapat diukur dengan nilai statistik t , nilai statistic F , dan koefisien determinasi. Perhitungan statistic disebut signifikan secara statistic apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah H_0 diterima (Ghozali, 2006)

3.4.3.1 Pengujian Signifikasi Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Cara melakukan uji t adalah dengan menggunakan rumus :

$$t = \frac{r_p \sqrt{n - k - 1}}{\sqrt{1 - r^2 p}}$$

Dimana :

t = t hitung parsial

rp = Korelasi Parsial

n = Banyaknya sampel

k = Variabel independen

Cara untuk mengetahui signifikansinya yaitu dengan membandingkan nilai t tabel. Apabila nilai t dihitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan, artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian hipotesis operasional sebagai berikut :

$H_0 : \rho_{yx_1} = 0$ Pajak Hotel secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

$H_a : \rho_{yx_1} \neq 0$ Pajak Hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

$H_0 : \rho_{yx_2} = 0$ Pajak Restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

$H_a : \rho_{yx_2} \neq 0$ Pajak Restoran secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Dengan kriteria pengujian :

- › Terima H_0 jika $t_{hitung} > \frac{1}{2} \alpha$ atau $-t \frac{1}{2} \alpha > t_{hitung}$
- › Terima H_0 jika $t_{hitung} - t \frac{3}{2} \alpha \leq t_{hitung} \leq t \frac{1}{2} \alpha$

3.4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali,2006).

Uji F sapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan digunakan uji F dengan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)} \quad (\text{Sugiono, 2013;235})$$

Dimana :

n = Banyaknya sampel

k = Variabel independen

Dengan level sigifikasi $\alpha = 0,05$ dengan derajat kebebasan $df(k) : (n-k-1)$

maka :

$H_0 : \rho = 0$ (Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah)

$H_a : \rho \neq 0$ (Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah)

Dengan kriteria pengujian :

- H_0 diterima jika $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$
- H_0 diterima jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$

Model dikatakan signifikan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

3.4.3.3 Koefisien Determinasi

Pengujian ini bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antara variabel dependen dan antara variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2006). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum, koefisien determinasi untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. Untuk mencari koefisien determinasi digunakan rumus :

$$Kd = r^2 \times 100 \% \quad (\text{Sigiyono, 2007;231})$$

Dimana :

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi

selanjutnya untuk mencari pengaruh faktor lain yang mempengaruhi variabel Y maka digunakan rumus koefisien nondeterminasi :

$$Knd = 1 - (r)^2 \times 100\%$$

Dimana :

Knd = Koefisien nondeterminasi

r = koefisien korelasi

3.4.4 Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian diatas, penulis akan melakukan analisa secara kuantitatif dan hasil analisa tersebut akan ditarik kesimpulan, apakah hipotesis yang telah ditetapkan diterima atau ditolak.